

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN  
SASARAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS PUBLIK DAN SISTEM  
PELAPORAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA OPD  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**SKRIPSI**

SYAKILA

NIM : 15622306



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG**

**2019**

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN  
SASARAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS PUBLIK DAN SISTEM  
PELAPORAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA OPD  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**S K R I P S I**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi

Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

Oleh :

**SYAKILA**

**NIM : 15622306**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG  
2019**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI  
PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN  
SASARAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS PUBLIK DAN SISTEM  
PELAPORAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA OPD  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Diajukan Kepada :

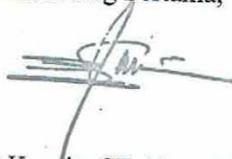
Panitia Komisi Ujian  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang

Oleh:

**SYAKILA**  
NIM : 15622306

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



Sri Kurnia, SE.Ak., M.Si. CA  
NIDN. 1020037101 / Lektor

Pembimbing Kedua,



Maryati, Sp.MM  
NIDN. 1007077101/ Asisten Ahli

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Sri Kurnia, SE.Ak., M.Si. CA  
NIDN. 1020037101 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : SYAKILA  
NIM : 15622306  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.38  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran,  
Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik  
dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja  
Manajerial Pada OPD Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dalam skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, Mei 2019

Penyusun



SYAKILA  
NIM. 15622306

## *HALAMAN PERSEMBAHAN*

*Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis merasa bersyukur telah dapat menyelesaikan skripsi ini diwaktu yang tepat.*

*Skripsi ini saya persembahkan untuk :*

- Kedua orang tua saya, Bapak Zulkifli dan Ibu Juwati terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.*
- Adikku Natasya dan Adam Rafli yang telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.*

## **MOTTO**

“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang seharusnya dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak.”

(Aldus Huxley)

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan, karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain) dan berharaplah kepada Tuhanmu.”

(Q.S Al Insyirah : 6-8)

“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga”.

(HR Muslim)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamin, tiada kata yang lebih indah dan lebih pantas kita panjatkan selain rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan taufik serta hidayah-NYA kepada penulis dalam menjalankan aktivitas serta memberikan kemudahan, kesehatan dan kelancaran kepada penulis dalam mengikuti pendidikan serta penyelesaian skripsi yang berjudul: **Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Manajerial Pada OPD Provinsi Kepulauan Riau** yang merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi pada program Strata 1 Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) pembangunan Tanjungpinang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan ikhlas serta pengabdian dan penghargaan yang diberikan kepada :

1. Ibu Charly Marlinda, SE.,M.Ak., Ak., CA., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E.,M.Si.,Ak., CA. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, SE.Ak.M.si.CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang dan selaku dosen

Pembimbing I yang banyak membantu dan memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Maryati, Sp. MM selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan ilmu yang bermanfaat.
5. Sahabatku Yuliani Putri, Sari Nur Kusmawati, Dwi Ananda Putri serta sahabat Gadis Penunggu Jodoh Lia, Tari, dan Wina yang telah banyak membantu dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman seangkatan di STIE Pembangunan terutama Nurliya Safitri dan Rizky Hermawan yang turut membantu dalam proses pembuatan skripsi ini dan teman-teman KKN Kelompok 30 E kang Anculai yang sudah memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh kelalaian dan keterbatasan waktu, tenaga juga kemampuan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Tanjungpinang, Februari 2019

Penulis

Syakila

## DAFTAR ISI

HAL

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1 Kegunaan Praktis .....	6
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Pustaka.....	9
2.1.1 Partisipasi Penyusunan Anggaran.....	9
2.1.1.1 Pengertian Anggaran.....	9

2.1.1.2	Pengertian Partispasi Penyusunan Anggaran .....	10
2.1.1.3	Manfaat Partispasi Penyusunan Anggaran.....	12
2.1.2	Kejelasan Sasaran Anggaran.....	15
2.1.2.1	Pengertian Kejelasan Anggaran .....	15
2.1.2.2	Fungsi Kejelasan Sasaran Anggaran.....	17
2.1.3	Akuntabilitas Publik.....	19
2.1.3.1	Pengertian Akuntabilitas .....	19
2.1.3.2	Pengertian Akuntabilitas Publik .....	21
2.1.3.3	Dimensi Akuntabilitas Publik .....	24
2.1.4	Sistem Pelaporan .....	25
2.1.5	Kinerja Manajerial .....	29
2.2	Kerangka Pemikiran.....	32
2.3	Hipotesis Penelitian .....	33
2.4	Tinjauan Peneliti Terdahulu.....	34

### BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian .....	38
3.2	Jenis Data.....	38
3.3	Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.4	Populasi, Sampel dan Responden.....	39
3.5	Operasional Variabel .....	43
3.6	Metode Analisis Data .....	47
3.6.1.	Uji Validitas .....	47
3.6.2.	Uji Reabilitas.....	48
3.6.3.	Uji Asumsi Klasik .....	48
3.6.4.	Uji Regresi Linear berganda .....	51
3.6.5.	Uji Hipotesis.....	52

## BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	55
4.1.1 Sejarah Provinsi Kepulauan Riau .....	55
4.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau .....	57
4.1.2.1 Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau .....	57
4.1.2.2 Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau .....	59
4.2 Gambaran Umum Karakteristik Responden .....	60
4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	60
4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur .....	61
4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan ...	62
4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan .....	63
4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja .....	64
4.3 Analisa Deskriptif Penilaian Responden .....	65
4.3.1 Analisa Deskriptif Penilaian Responden Terhadap Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (x1) .....	65
4.3.2 Analisa Deskriptif Penilaian Responden Terhadap Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (x2) .....	69
4.3.3 Analisa Deskriptif Penilaian Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas Publik(x3) .....	74
4.3.4 Analisa Deskriptif Penilaian Responden Terhadap Variabel Sistem Pelaporan(x4) .....	79
4.3.5 Analisa Deskriptif Penilaian Responden Terhadap Variabel Kinerja Manajerial(y) .....	84
4.4 Hasil Uji Kualitas Data .....	89
4.4.1 Uji Validitas .....	89
4.4.2 Uji Reliabilitas .....	94
4.5 Uji Asusmsi Klasik .....	95
4.5.1 Uji Normalitas .....	95
4.5.2 Uji Multikolinieritas .....	96
4.5.3 Uji Heterokedastisitas .....	98

4.5.4 Uji Autokorelasi .....	99
4.6 Uji Regresi Linier Berganda .....	100
4.7 Uji Hipotesis .....	103
4.7.1 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t).....	103
4.7.2 Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji f).....	105
4.7.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	106
4.8 Pembahasan .....	107
4.8.1 Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial.....	108
4.8.2 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial.....	109
4.8.3 Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial .....	110
4.8.4 Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Manajerial .....	111

## BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan .....	112
5.2 Saran .....	114

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## CURICULUM VITAE

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar OPD dan Jumlah Responden .....	42
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel .....	44
Tabel 4.1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin .....	60
Tabel 4.2 Karakteristik Berdasarkan Umur .....	61
Tabel 4.3 Karakteristik Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	62
Tabel 4.4 Karakteristik Berdasarkan Jabatan.....	63
Tabel 4.5 Karakteristik Berdasarkan Lama Berkerja.....	64
Tabel 4.6 Penilaian Responden terhadap Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran.....	66
Tabel 4.7 Penilaian Responden terhadap Variabel Partisipasi Kejelasan Sasaran Anggaran .....	70
Tabel 4.8 Penilaian Responden terhadap Variabel Akuntabilitas Publik .....	74
Tabel 4.9 Penilaian Responden terhadap Variabel Sistem Pelaporan.....	80
Tabel 4.10 Penilaian Responden terhadap Variabel Kinerja Manajerial .....	85
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Partisipasi Penyusunan Anggaran (X1) .....	90
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Kejelasan Sasaran Anggaran(X2).....	91
Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Publik(X3) .....	91
Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas Sistem Pelaporan(X4) .....	92
Tabel 4.15 Hasil Uji Validitas Kinerja Manajerial(Y).....	93
Tabel 4.16 Hasil Uji Reliabilitas .....	94
Tabel 4.17 Hasil Uji Multikolinieritas .....	97
Tabel 4.18 Hasil Uji Autokorelasi .....	99
Tabel 4.19 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	101
Tabel 4.20 Hasil Uji Parsial (Uji T) .....	103
Tabel 4.21 Hasil Uji Simultan (UJI F).....	106
Tabel 4.22 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	107

## DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran .....	33
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Normalitas Kinerja Manajerial .....	95
Tabel 4.2 Grafik Normal P-P Plot Kinerja Manajerial .....	96
Tabel 4.3 Grafik <i>Scatterplot</i> Kinerja Manajerial .....	98

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2. Output Uji Data SPSS 21
- Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4. Biodata (*Curriculum Vitae*)
- Lampiran 5. Uji Plagiat

## ABSTRAK

### PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS PUBLIK DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA OPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Syakila. 15622306. Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. [sykla17@gmail.com](mailto:sykla17@gmail.com)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh apakah variabel Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Manajerial Pada OPD Provinsi Kepulauan Riau. Data yang digunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari sejumlah pejabat (eselon) yang ada di OPD Provinsi Kepulauan Riau yang berjumlah 112 sampel, dengan Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*.

Dengan menggunakan *software SPSS 21* dapat diketahui bahwa variabel pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada OPD Provinsi Kepulauan Riau dengan variabel partisipasi penyusunan anggaran sebagai variabel yang paling dominan yang mana didapat melalui persamaan regresi  $Y = -1,080 + 0,397X_1 + 0,168X_2 + 0,217X_3 + 0,252X_4$ .

Dari hasil penelitian ini juga diketahui bahwa variabel pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial.

Dan dari hasil pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ) diperoleh koefisien determinasi Adjusted R Square sebesar 0,541, yang menunjukkan bahwa sumbangan persentase pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan sistem pelaporan terhadap kinerja manajerial sebesar 54,1 % sedangkan sisanya 45,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci : partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, sistem pelaporan, kinerja manajerial.

Referensi : 20 buku (2008-2015), 22 jurnal.

Dosen Pembimbing 1 : Sri Kurnia, SE.Ak. M.Si. Ca

Dosen Pembimbing 2 : Maryati, Sp. MM

## **ABSTRACT**

### ***THE INFLUENCE OF BUDGET PARTICIPATION, BUDGET GOAL CLARITY, PUBLIC ACCOUNTABILITY, AND REPORTING SYSTEMS ON MANAGERIAL PERFORMANCE IN OPD AT RIAU ISLANDS PROVINCE***

*Syakila. 15622306. Accounting. College of Economics (STIE) Development Tanjungpinang. sykla17@gmail.com*

*This study aims to know and analyze the effect of variables of Budget Participation, Budget Goal Clarity, Public Accountability and Reporting System on Managerial Performance in OPD at Riau Islands Province. Data used primary data and secondary data obtained from a number of officials (echelon) in OPD at Riau Islands Province totalling 112 samples, sampling technique used was Purposive Sampling.*

*By using SPSS 21 software, it can be known that the variable influence of budget participation, budget goals clarity, public accountability and reporting systems is a positive and significant effect on managerial performance in OPD at Riau Islands Province with variable budget participation as the most dominant variable which was obtained through regression equation  $Y' = -1,080 + 0,397X1 + 0,168X2 + 0,217X3 + 0,252X4e$ .*

*From the results of these study it is also known that the variables of the influence of budget participation, budget goals clarity, public accountability and reporting systems effect significantly on managerial performance.*

*The results of testing coefficient of determination (R<sup>2</sup>) obtained the coefficient of determination Adjusted R Square of 0.541, which show that the influence of the percentage contribution influence of budget participation, budget goals clarity, public accountability and reporting systems on managerial performance is 54.1% while the rest is affected 45, 9% is influenced by other variables that are not examined in this study.*

*Keywords: budget participation, budget goals clarity, public accountability, reporting systems, managerial performance.*

*References: 20 books (2008-2015), 22 joernals.*

*Lecture advisor 1: Sri Kurnia, SE.Ak. M.Sc. Ca  
Lecture Advisor2: Maryati, Sp. MM*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kinerja manajerial dalam sebuah organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan kinerja manajerial yang baik dapat menciptakan keunggulan daya saing suatu organisasi. Akhir-akhir ini pemerintah daerah mendapat tekanan dari masyarakat agar dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya demi terwujudnya *good governance*. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah harus membenahi diri untuk merespon perubahan yang diinginkan oleh masyarakat sebagai *stakeholder*. *Good governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Dalam mewujudkan *good governance*, maka diperlukan kinerja manajerial yang tertata dan terencana dengan baik serta peran partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kinerja manajerial adalah hasil dari proses aktivitas manajerial yang efektif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan. Variabel kinerja manajerial diukur dengan menggunakan instrumen *self rating* yang dikembangkan oleh Mahoney (1963) dalam Efrizar (2017), di mana setiap responden diminta untuk mengukur kinerja sendiri ke dalam delapan dimensi, yaitu perencanaan,

investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, negosiasi, dan perwakilan, serta satu dimensi pengukuran kinerja seorang kepala dinas, kepala bagian dan kepala bidang secara keseluruhan.

Menurut Teguh Arifiyadi (2008) dalam Konsep Tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia, Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, juga tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Anggaran adalah alat perencanaan dan pengendalian yang sangat penting, sehingga proses penyusunan anggaran merupakan aspek penting dalam pencapaian keberhasilan dari suatu organisasi. Agar anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan, pegawai dan manajer dalam penyusunan anggaran yang dinamakan dengan partisipasi anggaran. Partisipasi anggaran melibatkan bawahan dalam proses penyusunannya, sehingga bawahan yang kinerjanya diukur berdasarkan anggaran akan termotivasi untuk mencapai kinerja sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam anggaran. Partisipasi dalam penyusunan anggaran

merupakan pendekatan manajerial yang umumnya dinilai dapat meningkatkan kinerja manajerial.

Pemerintah dalam usaha lingkup anggaran pun menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu karakteristik sistem anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran juga akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Sistem Penganggaran yang baik akan menghasilkan sebuah laporan yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan dan transparan di lingkungan pemerintah dan masyarakat.

Sistem Pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan yang baik harus disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku agar hasil laporan tersebut dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan kinerja manajemen dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Karakteristik sistem pelaporan yang baik menurut Herawaty (2011) yaitu laporan merinci varian-varian prestasi aktual berdasarkan faktor-faktor penyebabnya dari unit organisasi, mencakup ramalan tahunan, serta mencantumkan penjelasan mengenai penyebab variansi (penyimpangan) serta tindakan yang diambil untuk mengoreksi variansi yang tidak

menguntungkan, dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi/perbaikan bisa efektif..

Pada tahun 2017 akuntabilitas kinerja pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapat predikat BB dengan nilai 70,13. Sementara daerah yang mendapat nilai A yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Selatan. Ini menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau satu tingkat lagi mencapai predikat A. Kurangnya kerja sama antar OPD dalam mempersiapkan laporan, pencapaian target kinerja dan target sasaran anggaran yang secara keseluruhan belum terpenuhi karena dipengaruhi adanya defisit anggaran, dan transparansi terhadap masyarakat yang kurang maksimal menyebabkan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum mendapat hasil yang sangat sempurna dalam mewujudkan *good governance*. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul **“Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik Dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Manajerial Pada OPD Provinsi Kepulauan Riau”**.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial OPD Provinsi Kepulauan Riau?

2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial OPD Provinsi Kepulauan Riau?
3. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial OPD Provinsi Kepulauan Riau?
4. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap kinerja manajerial OPD Provinsi Kepulauan Riau?
5. Apakah partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap kinerja manajerial OPD Provinsi Kepulauan Riau?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial OPD Provinsi Kepulauan Riau.
2. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial OPD Provinsi Kepulauan Riau.
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial OPD Provinsi Kepulauan Riau.
4. Untuk mengetahui pengaruh sistem pelaporan terhadap kinerja manajerial OPD Provinsi Kepulauan Riau.

5. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap kinerja manajerial OPD Provinsi Kepulauan Riau.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti, yaitu :

##### **1.4.1 Kegunaan Ilmiah**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Sebagai bahan masukan pemikiran kepada OPD Provinsi Kepulauan Riau di dalam penyusunan anggaran yang pada akhirnya mampu menyusun anggaran OPD yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan guna mencapai kinerja pemerintahan yang lebih baik.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Adanya sistematika penulisan ini adalah untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

## BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas tentang jenis penelitian, jenis data, penentuan populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel, dan metode analisis data penelitian.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang meliputi deskripsi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan sistem pelaporan. Karakteristik responden yang menjadi sampel penelitian, distribusi data, pengujian persyaratan analisis yang terdiri atas pengujian validitas dan pengujian reliabilitas instrument penelitian, pengukuran koefisien determinasi dan pengukuran

koefisien regresi serta pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan analisis kuantitatif.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Partisipasi Penyusunan Anggaran**

###### **2.1.1.1 Pengertian Anggaran**

Anggaran berasal dari kata *budget* yang sebelumnya dari kata *Bougette* yang artinya sebuah tas kecil. (Ikhsan, 2009:173), memberikan pendapatnya mengenai anggaran yakni anggaran merupakan perencanaan manajerial untuk melakukan suatu tindakan dalam ungkapan-ungkapan keuangan. Anggaran merupakan istilah singkat dari perencanaan laba yang terpadu dan meliputi pilihan pilihan manajemen dan tujuan-tujuan terhadap organisasi dan penyediaan dana sebagai salah satu acuan dalam menjalankan operasional sehari-hari.

Menurut Suharsimi (2010) , anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang. Sedangkan menurut Nafarin (2012:19), anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Dan Nafarin (2013:11) juga mendefinisikan

bahwa “Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa”.

Sasongko (2015:2) berpendapat bahwa anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran diantaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan.

Kata anggaran mencerminkan adanya unsur keterbatasan. Pada dasarnya anggaran perlu disusun karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah dalam hal ini yang dimaksud adalah dana. Karena terbatasnya dana, maka diperlukan alokasi sesuai dengan prioritas dan dalam kurung waktu yang ditentukan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun secara sistematis dan dinyatakan dalam satuan uang, barang atau jasa untuk waktu periode yang akan datang.

#### **2.1.1.2 Pengertian Partisipasi Penyusunan Anggaran**

Anggaran mempunyai dampak langsung terhadap manusia terutama bagi yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran. Indarto dan Ayu (2011: 1). Garrison et al (2013:35) mengartikan anggaran partisipatif merupakan anggaran yang disusun dengan kerjasama dan partisipasi penuh dari seluruh manajer pada segala

tingkatan. Sementara Hansel/Mowen (2013:223), mendefinisikan partisipasi anggaran sebagai suatu pendekatan penganggaran yang memungkinkan para manajer yang akan bertanggungjawab atas kinerja anggaran, untuk berpartisipasi dalam pengembangan anggaran, partisipasi anggaran mengkomunikasikan rasa tanggungjawab kepada para manajer tingkat bawah dan mendorong kreativitas.

Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan motivasi manajerial. Indarto dan Ayu (2011 : 34). Menurut Emilia et al (2013) partisipasi penyusunan anggaran merupakan proses yang didalamnya terdapat individu yang terlibat dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan target anggaran yang akan mengevaluasi dan perlunya penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut. Syahputra (2014) juga menjelaskan bahwa partisipasi penyusunan anggaran merupakan keterlibatan manajer atau bawahan dalam proses penganggaran. Partisipasi dalam pengaturan anggaran dapat menginspirasi manajer atau kepala. Kemudian mereka akan berniat untuk masukan lebih banyak energi dan waktu ke dalam pekerjaan untuk memenuhi target anggaran. Partisipasi ini adalah salah satu kondisi yang meningkatkan kinerja organisasi.

Dari beberapa penjelasan diatas disimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran sebagai suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para anggota organisasi dalam mencapai tujuan dan kerjasama untuk menentukan satu rencana.

### **2.1.1.3 Manfaat Partispasi Penyusunan Anggaran**

Siegel et al. (1989) dalam Mardika (2015), menyebutkan manfaat partisipasi dalam proses penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Seseorang yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran tidak saja *task involid* melainkan juga *ego involved* dalam kerjasama;
2. Keterlibatan seseorang akan meningkatkan rasa kebersamaan dalam kelompok, karena dapat meningkatkan kerjasama antara anggota kelompok di dalam penetapan sasaran, serta dapat mengurangi rasa tertekan; dan
3. Keterlibatan seseorang akan mengurangi rasa perbedaan di dalam mengalokasikan sumber daya di antara unit-unit yang ada dalam organisasi.

Menurut Hansen and Mowen (2013:225) yang diterjemahkan oleh Deny Arnos Kwary manfaat dari partisipasi anggaran adalah sebagai berikut anggaran partisipatif mengkomunikasikan, mendorong kreativitas serta meningkatkan tanggungjawab dan tantangan manajer

level bawah dan mencegah yang mengarah pada tingkat kinerja yang lebih tinggi. Keikutsertaan para manajer level menengah dan bawah dalam penentuan anggaran akan mendapatkan keputusan yang lebih realistis sehingga tercipta kesesuaian tujuan perusahaan yang lebih besar. Keunggulan anggaran partisipatif menurut Garrison et al. (2013:384) adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang pada tingkatan organisasi diakui sebagai anggota tim yang pandangan dan penilaiannya dihargai oleh manajemen puncak.
2. Estimasi anggaran yang dibuat oleh manajer lini depan sering kali lebih akurat dan andal dibandingkan dengan estimasi yang dibuat oleh manajer puncak yang kurang memiliki pengetahuan mendalam mengenai pasar dan operasi sehari-hari.
3. Timbul motivasi yang lebih tinggi bila individu berpartisipasi dalam menentukan tujuan mereka sendiri, dibandingkan bila tujuan tersebut ditetapkan dari atas. Anggaran yang ditetapkan sendiri menciptakan adanya komitmen.
4. Seorang manajer yang tidak dapat memenuhi anggaran yang ditetapkan dari atas selalu dapat berkata bahwa anggaran tersebut tidak realistis dan tidak mungkin untuk dicapai. Dengan anggaran yang ditetapkan sendiri, alasan semacam itu tidak akan timbul.

Sementara Bagus (2010) berpendapat bahwa salah satu manfaat dari partisipasi yang berhasil adalah bahwa partisipasi

menjadi terlibat secara emosi dan bukan hanya tugas dalam pekerjaan mereka. Partisipasi dapat meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang lebih besar pada semua tingkatan manajemen. Partisipasi juga meningkatkan kerja sama antar anggota kelompok dalam penetapan tujuan. Mutiarasari (2018) menyebutkan manfaat dari partisipasi penyusunan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerjasama yang baik antar departemen.
2. Mengurangi atau menghilangkan konflik dan ketegangan diantara anggota organisasi.
3. Meningkatkan kinerja atau prestasi manajer karena manajer atau bawahan memiliki rasa tanggung jawab untuk mencapainya karena merasa ikut terlibat dalam penyusunan anggaran.
4. Menambah pemahaman tentang tugas, tanggung jawab dan strategi yang akan dijalankan karena bawahan diberi kesempatan lebih untuk meminta penjelasan dari atasan.
5. Memungkinkan adanya transfer informasi dari bawahan kepada atasan sehingga pendapat menggunakan informasi sebagai masukan untuk menerapkan strategi yang lebih baik dan anggaran yang disusun lebih relevan.

Keikutsertaan aparat pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran dapat mengembangkan pengetahuan mereka tentang anggaran dan kemudian mampu menginformasikan secara jelas kepada masyarakat mengenai anggaran yang disusun oleh pemerintah.

Pada sektor publik, partisipasi anggaran dilakukan ketika antara pihak eksekutif, legislatif, dan masyarakat bekerja sama dalam pembentukan anggaran. Unit OPD (masing-masing instansi, dinas, kantor) membuat usulan usulan yang kemudian disampaikan kepada Kepala Bagian, Kepala Bagian menyampaikan usulan tersebut kepada Kepala Daerah, kemudian Kepala Daerah bersama DPRD membahas anggaran tersebut, hasil dari pembahasan tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai anggaran yang tentunya dibuat sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

## **2.1.2 Kejelasan Sasaran Anggaran**

### **2.1.2.1 Pengertian Kejelasan Sasaran Anggaran**

Karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggarannya. Kenis (1979) dalam Bangun (2009) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi Pemerintah.

Oleh sebab itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka

yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Kenis juga menyatakan bahwa anggaran tidak hanya sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya dan pendapatan dalam pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi, sisi lain anggaran juga merupakan alat bagi manajerial OPD untuk mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi kinerja dan memotivasi bawahannya.

Kenis (1979) dalam Syafrial (2009), mengatakan kejelasan sasaran anggaran disengaja untuk mengatur perilaku karyawan. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sasaran merupakan suatu hal yang hendak dicapai oleh karyawan. Jadi kejelasan sasaran anggaran akan mendorong manajer lebih efektif dan melakukan yang terbaik dibandingkan dengan sasaran yang tidak jelas.

Menurut Ginting (2009), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran dapat dilihat dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasinya dalam periode satu tahun tertentu. Sementara itu, Yulianti (2014) juga mendefinisikan kejelasan anggaran sebagai gambaran keluasan anggaran yang dinyatakan secara

jelas dan spesifik serta dimengerti oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya. Kejelasan sasaran anggaran dalam organisasi pemerintahan adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, atau triwulan (Muzahid, 2017).

Dari beberapa definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa kejelasan anggaran sebagai suatu gambaran untuk mengetahui sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggarannya. Adanya tuntutan dari masyarakat agar anggaran yang efektif dan efisien serta adanya Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK. 02/ 2011 yang menyebutkan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) menjadikan pemerintah harus memiliki kejelasan dalam hal anggaran yang mereka buat.

#### **2.1.2.2 Fungsi Kejelasan Sasaran Anggaran**

Fungsi dari sasaran anggaran yang jelas mempermudah pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan mempersulit pelaksanaan anggaran.

Menurut Locke dan Latham (1984) dalam Sembiring (2008), agar pengukuran sasaran efektif ada 7 indikator yang diperlukan:

1. Tujuan, membuat secara terperinci tujuan umum tugas-tugas yang harus dikerjakan.
2. Kinerja, menetapkan kinerja dalam bentuk pertanyaan yang diukur.
3. Standar, menetapkan standar atau target yang ingin dicapai.
4. Jangka Waktu, menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan.
5. Sasaran Prioritas, menetapkan sasaran yang prioritas.
6. Tingkat Kesulitan, menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan pentingnya.
7. Koordinasi, menetapkan kebutuhan koordinasi.

Direktorat jenderal Otonomi Daerah menyatakan, pada dasarnya arah dan kebijakan umum APBD memuat informasi mengenai tujuan dan sasaran yang nantinya akan dicapai oleh daerah yang bersangkutan dalam tahun anggaran tertentu. Tujuan dan sasaran APBD harus disesuaikan dengan lima kriteria sebagai berikut:

1. Spesifik. Sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Sasaran tersebut harus memberikan kepada unit kerja dalam merumuskan strategi atau tindakan terbaiknya.
2. Terukur. Sasaran harus menyatakan dalam satuan ukuran tertentu sehingga memudahkan penilaian tingkat pencapaiannya. Menantang tapi realistis. Sasaran harus menantang untuk dicapai, namun tetap realistis dan masih memungkinkan untuk dicapai.

3. Berorientasi pada hasil akhir. Sasaran harus difokuskan pada hasil atau pengaruh akhir yang akan dicapai, bukan pada proses atau cara mencapainya.
4. Memiliki batas waktu. Sasaran sebaiknya menentukan secara jelas kapan hasil atau pengaruh akhir yang ditetapkan tersebut akan dicapai.

Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran tingkat kinerja dapat tercapai. Pencapaian kinerja ini akan terkait dengan motivasi, dimana hal ini disebabkan dengan motivasi yang tinggi akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Dengan kata lain, kinerja manajerial akan dipengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

### **2.1.3 Akuntabilitas Publik**

#### **2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas**

Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya, akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Teguh Arifiyadi (2008)

dalam Konsep Tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia, Akuntabilitas dapat diartikan sebagai: “kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan control terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.” Definisi dari akuntabilitas menurut Gray *et al.*, dalam Masiyah (2008) adalah: “ *Accountability is the duty of an entity to use (and prevent the misuse) of the resources entrusted it in a effective, efficient and economical manner, within the boundaries of the moral and legal framework of the society and to provide an account of its actions to accountees who are not only the persons who provided it with its financial resources but to groups within society and society at large.*”

Definisi akuntabilitas menurut Lloyd, *et al* dalam Ebrahim (2010) adalah sebagai berikut: “*The processes through which an organization makes a commitment to respond to and balance the needs of stakeholders in its decision making processes and activities, and delivers against this commitment.*” Menurut Penny Kusumatuti (2014:2) definisi akuntabilitas adalah sebagai berikut: “Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik

untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya.”

Sedangkan menurut Setiawan (2013) akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh seseorang atau sekelompok orang (organisasi) yang telah menerima amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.

### **2.1.3.2 Pengertian Akuntabilitas Publik**

Menurut Prof. Dr. Moeheriono, M.Si (2012:118) Akuntabilitas publik adalah meningkatkan kemampuan setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa. Penataan sistem dan proses manajemen pemerintahan diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan berkinerja tinggi (*high performance government*)

kesuksesan dalam hal ini terletak pada manajemen kinerja yang sejauh ini belum banyak dilakukan pada instansi pemerintah dan sudah bertahun-tahun berada pada posisi yang selalu berfokus pada output oriented menerapkan manajemen kinerja yang berorientasi pada outcome oriented sehingga apa yang dihasilkan oleh mereka melalui proses manajemen benar-benar efisien dan efektif serta ekonomis.

Menurut Mardiasmo (2009) dalam bukunya menyebutkan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

a. Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*).

Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

b. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*).

Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Menurut Dwiyanto (2008:51), akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Dari penjelasan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktiva dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Baik pemerintah pusat maupun daerah harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

### 2.1.3.3 Dimensi Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Bentuk dimensi pertanggungjawaban publik oleh pemerintah daerah disampaikan oleh Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2009). Menurutnya terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*accountability for probity and legality*). Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-

pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.

3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

#### **2.1.4 Sistem Pelaporan**

Menurut Susanto (2008:18) sistem adalah kumpulan atau group dari sub sistem atau bagian atau komponen ataupun baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai tujuan yang tertentu. Sementara menurut Mulyadi (2010:2) sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Sutanta (2009:4) juga menyatakan bahwa sistem adalah kumpulan hal atau elemen yang saling bekerja sama atau yang

dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sekelompok unsur atau bagian atau komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan saling bekerja sama atau untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan.

Abdullah (2000) dalam Hidayattullah (2015) menjelaskan bahwa sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. LAN dan BPKP (2011) mengemukakan bahwa laporan yang baik adalah laporan yang harus disusun secara jujur, objektif dan transparan. Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan. (Hidayattullah, dan Irine Herdjion, 2015).

Menurut Efrizar (2017) sistem pelaporan adalah laporan yang menggambarkan mengenai penyebab terjadinya penyimpangan,

tindakan yang diambil untuk mengoreksi variansi yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi lebih efektif. Sistem pelaporan untuk organisasi sektor publik di Indonesia diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sistem pelaporan digunakan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggungjawaban. James A. Hall, (2008:574) mengatakan, agar efektif suatu laporan harus memiliki atribut berikut ini:

- a. Relevan, setiap elemen informasi dalam suatu laporan harus mendukung keputusan manajer.
- b. Ringkas, yaitu laporan harus diringkas sesuai dengan tingkat manajer dalam hirarki organisasi.
- c. Orientasi pengecualian, yaitu laporan-laporan kontrol mengidentifikasi-kan aktivitas-aktivitas yang beresiko diluar kontrol dan harus mengabaikan aktivitas yang dibawah kontrol.
- d. Akurasi, yaitu informasi dalam laporan harus bebas dari kesalahan material.
- e. Kelengkapan, yaitu informasi harus selengkap mungkin.

- f. Tepat waktu, yaitu jika seorang manajer harus memiliki waktu, mereka mungkin tidak pernah mengambil keputusan yang buruk.
- g. Padat, yaitu informasi dalam suatu laporan harus disajikan sepadat mungkin.

Sistem Pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi atau laporan keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk memberikan, mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.(Anjarwati, 2012). Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa sistem pelaporan merupakan suatu kumpulan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan kinerja manjerial dalam mengimplementasikan anggaran.

Dalam rangka pertanggungjawaban APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD harus disusun dan disajikan berdasarkan SAP yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan. Aspek yang diukur dalam sistem pelaporan menurut meliputi:

- a. Kecepatan membuat laporan.

- b. Laporan yang dibuat.
- c. Waktu pembuatan laporan

Agar dapat membantu dan mengembalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan diperlukan sistem pelaporan yang baik. Anthony et. Al. (1989) dalam Herawaty (2011) mengungkapkan karakteristik sistem pelaporan yang baik sebagai berikut:

- a. Laporan merinci varian-varian prestasi aktual berdasarkan faktor-faktor penyebabnya dari unit organisasi
- b. Laporan ini mencakup ramalan tahunan.
- c. Laporan ini mencantumkan penjelasan mengenai, yaitu penyebab variansi (penyimpangan), tindakan yang diambil untuk mengoreksi variansi yang tidak menguntungkan, dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi/perbaikan bisa efektif.

### **2.1.5 Kinerja Manajerial**

Kinerja merupakan standar yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang dilimpahkan kepada manajer sebagai penyatuan antara variable proses, hasil, dan output. Amertadew dan Dwirandra, 2013 (Hapsari, 2013:554). Sedangkan menurut Edison (2016) kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Torang (2012) menjelaskan bahwa kinerja manajerial adalah hasil pekerjaan seseorang yang sesuai dengan standar, norma, aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Mahoney *et. al* (1963) dalam Zulkarnain (2013) juga menjelaskan bahwa kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, yang diukur dengan menggunakan indikator :

1. Perencanaan adalah penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan untuk selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi waktu sekarang dan yang akan datang. Perencanaan bertujuan untuk memberikan pedoman dan tata cara pelaksanaan tujuan, kebijakan, prosedur, penganggaran dan program kerja sehingga terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Investigasi merupakan kegiatan untuk melakukan pemeriksaan melalui pengumpulan dan penyampaian informasi sebagai bahan pencatatan, pembuatan laporan, sehingga mempermudah dilaksanakannya pengukuran hasil dan analisis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan.
3. Koordinasi, menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran informasi dengan orang-orang dalam unit organisasi lainnya, guna dapat berhubungan dan menyesuaikan program yang akan dijalankan.
4. Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan oleh pimpinan terhadap rencana yang telah dibuat, dan ditujukan untuk menilai pegawai

dan catatan hasil kerja sehingga dari hasil penilaian tersebut dapat diambil keputusan yang diperlukan.

5. Pengawasan, yaitu penilaian atas usulan kinerja yang diamati dan dilaporkan atau kemampuan untuk mengarahkan, memimpin, membimbing, menjelaskan segala aturan yang berlaku, memberikan dan menangani keluhan pelaksanaan tugas bawahan.
6. Pemilihan Staff, yaitu memelihara dan mempertahankan bawahan dalam suatu unit kerja, menyeleksi pekerjaan baru, menempatkan dan mempromosikan pekerjaan tersebut dalam unitnya atau unit kerja lainnya.
7. Negosiasi, yaitu usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal pembelian, penjualan atau kontrak untuk barang-barang dan jasa.
8. Perwakilan, yaitu menyampaikan informasi tentang visi, misi, dan kegiatan-kegiatan organisasi dengan menghadiri pertemuan kelompok bisnis dan konsultasi dengan kantor-kantor lain.
9. Kinerja manajerial merupakan hasil dari proses aktivitas manajerial yang efektif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan. Kinerja manajerial yang dimaksud dalam penelitian ini yakni kinerja kepala dinas, kepala bidang, kepala bagian, kepala seksi, kepala sub bidang, dan kepala sub bagian. Dalam kegiatan manajerial yang mencakup perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, laporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan.

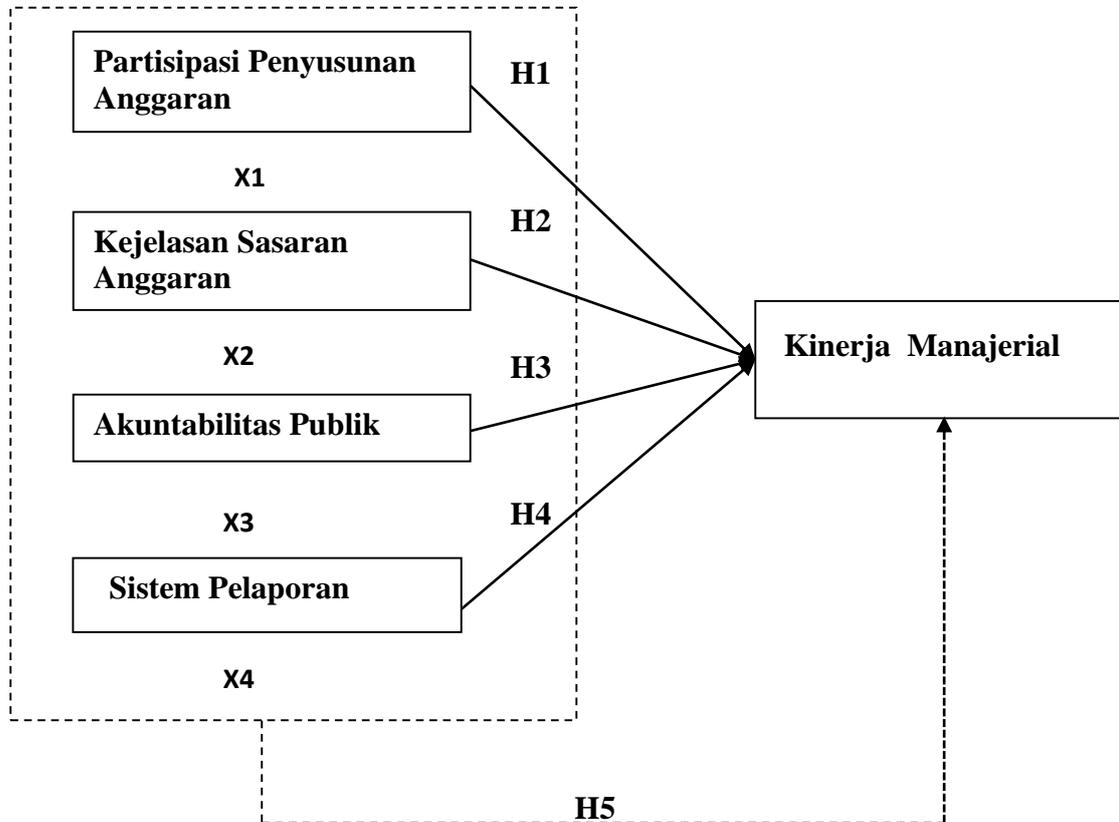
10. Kinerja pemerintah daerah dapat dipahami sebagai tingkat pencapaian hasil dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi tersebut, atau dapat pula disimpulkan bahwa kinerja organisasi merupakan suatu tingkatan sejauh mana proses kegiatan organisasi itu memberikan hasil atau mencapai tujuan.

Kinerja manajerial merupakan prestasi yang diperoleh manajer dalam mencapai tujuan organisasi. Widya dalam Apriyanti (2017). Sedangkan menurut Julyalahi (2017) kinerja manajerial adalah pencapaian organisasi yang didasarkan atas visi misi sebuah organisasi. Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja manajerial merupakan prestasi seseorang dalam bekerja dimana manajer dapat mencapai tujuan organisasi yang disesuaikan dengan visi misi dan sasaran organisasi.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Kerangka Pemikiran adalah model berfikir konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai hal yang penting. Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis akan mengembangkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



Keterangan Gambar:      ——— Secara Parsial  
    - - - - - Secara Simultan

Dari kerangka Pemikiran di atas memperlihatkan bahwa Kinerja Manajerial sebagai Variabel Dependen (Variabel Terikat) diduga akan dipengaruhi oleh Variabel Independen lainnya berupa Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Sistem Pelaporan.

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah :

- H1 : Diduga partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial secara parsial.
- H2 : Diduga kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial secara parsial.
- H3 : Diduga akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial secara parsial.
- H4 : Diduga sistem pelaporan berpengaruh terhadap kinerja manajerial secara parsial.
- H5 : Diduga partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap kinerja manajerial secara simultan.

#### **2.4 Tinjauan Peneliti Terdahulu**

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini yang dilakukan oleh Rona Efrizar (2017) menguji tentang Pengaruh Kejelasan Anggaran, Akuntabilitas Publik, dan Sistem Pelaporan terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu), dari hasil penyebaran 81 kuesioner, disimpulkan bahwa kejelasan anggaran, akuntabilitas publik dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Deki Putra (2013) menguji tentang Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (*Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah*

*Kota Padang*). Hasil Penelitiannya mengungkapkan hipotesisi pertama menunjukkan bahwa akuntabilitas public berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini juga didukung dengan hipotesis kedua yang menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran juga berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Hidayatullah (2015) menguji tentang Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD di Merauke. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh positif baik secara parsial maupun simultan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD di Merauke. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Netty Herawati (2011) tentang Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja manajerial instansi pemerintah daerah Kota Jambi.

Andarias Bangun (2009) melakukan penelitian tentang Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang). Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja manajerial SKPD, serta untuk menguji pengawasan internal akan memoderasi pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara simultan seluruh variable independen berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD, dan hasil analisis secara parsial terdapat satu variable independen yang tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD yaitu kejelasan sasaran anggaran. Begitu juga didapat bahwa pengawasan internal tidak dapat memoderasi pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD.

Penelitian yang diteliti oleh Cecilia Lelly Kewo (2014) tentang *The Effect of Participative Budgeting, Budget Goal Clarity and Internal Control Implementation on Managerial Performance. The research conducted on 78 working unit area device in 15 districts of North Sulawesi Province-Republic of Indonesia. The result are simultaneously participative budgeting, budget goal clarity and implementation of internal control have significant and positive effect on managerial performance and Partially participative budgeting, budget goal clarity*

*and implementation of internal control have positive and significant effect on managerial performance.*

Ardiyanti Baharuddin (2015) meneliti tentang *The Effect of Budgetary Participation, Budget Goal Clarity, Decentralized Structure, and Public Accountability on the Performance of Regional Work Units (SKPD) at Gowa District, Sulawesi Selatan. The result of this research shows that partially, budgetary participation, budget goal clarity, decentralized structure, and public accountability had positive effect on the performance of Gowa's SKPD. Simultaneously, budgetary participation, budget goal clarity, decentralized structure, and public accountability had positive effect on the performance of Gowa's SKPD, and budgetary participation became the most dominant variable that had positive effect on the performance of Gowa's SKPD.*

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melalui analisis data dengan menggunakan prosedur statistik. (Indriantoro, 2011).

Penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan serta memperlihatkan pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan sistem pelaporan sebagai variabel independen dengan kinerja manajerial sebagai variabel dependennya.

#### **3.2 Jenis Data**

Jenis dan sumber data penelitian ini adalah data primer, yaitu mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. (Sekaran, 2008:60). Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh priset untuk menjawab masalah riset khusus. (Sunyoto, 2011). Data primer diperoleh dalam penelitian ini melalui penyebaran kuesioner secara langsung dari sumbernya, sehingga priset merupakan tangan pertama yang memperoleh data tersebut.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini:

1. Proses survey dengan pembagian kuesioner. Pemberian kuesioner merupakan cara pengumpulan data melalui daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Daftar pertanyaan atau kuesioner, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan sesuai kebutuhan informasi yang diinginkan kepada responden yang menjadi objek penelitian untuk mendapatkan jawaban data primer dari responden
2. Observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan tentang keadaan yang ada di lapangan. Dengan melakukan observasi, penulis menjadi lebih memahami tentang subyek dan obyek yang sedang diteliti.
3. Studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

### **3.4 Populasi, Sampel dan Responden**

Sujarweni (2015:80) populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Kepulauan Riau yang berjumlah 39 OPD.

Sujarweni juga mengatakan dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Bisnis dan ekonomi, sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Dalam penelitian

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling method* dimana informasi yang dapat diperoleh dari orang-orang yang menjadi sasaran khusus penelitian, karena hanya orang-orang tersebut yang dianggap memiliki kompetensi untuk memberikan informasi yang dibutuhkan atau memang hanya orang-orang itu yang dianggap memiliki kriteria yang ditetapkan. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pejabat struktural yang terlibat dalam penyusunan anggaran. Adapun pejabat struktural yang terlibat dalam penelitian ini adalah Pegguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada setiap OPD Provinsi Kepulauan Riau..

Untuk menghitung penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang dikembangkan, maka pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin. Perhitungan pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N.d^2}$$

Dimana:

$n$  = ukuran sampel

$N$  = Populasi

$d$  = taraf nyata atau batas kesalahan

Jadi, dalam penelitian ini penulis menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5%, karena dalam setiap penelitian tidak mungkin hasilnya sempurna 100%, makin besar tingkat kesalahan maka semakin sedikit ukuran sampel. Jumlah populasi yang digunakan adalah 156 orang, dengan perhitungan di atas maka:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot d^2}$$
$$n = \frac{156}{1 + 156 \cdot (5\%)^2}$$
$$n = 112,23 \text{ kuesioner}$$

Jadi dari anggota populasi yang diambil sebagai sampel adalah sebanyak 112,23 orang responden. Pada perhitungan yang menghasilkan pecahan (terdapat koma) sebaiknya dibulatkan keatas, hal ini lebih aman daripada kurang dibawahnya. Maka sampel yang digunakan berdasarkan populasi diatas yaitu 112 orang yang disebar ke 39 OPD Provinsi Kepulauan Riau. Berikut adalah daftar Organisasi Perangkat Daerah beserta jumlah responden yang menjadi obyek penelitian disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1 Daftar OPD dan Jumlah Responden**

<b>No.</b>	<b>Organisasi Perangkat Daerah (OPD)</b>	<b>Jumlah Responden</b>
1	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	4
2	Biro Hukum	4
3	Biro Kesejahteraan Rakyat	4
4	Biro Administrasi Perekonomian	4
5	Biro Administrasi Layanan Pengadaan	4
6	Biro Administrasi Pembangunan	4
7	Biro Umum	2
8	Biro Organisasi dan KORPRI	2
9	Biro Humas, Protokol, dan Penghubung	2
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4
11	Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau	4
12	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	4
13	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	4
14	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4
15	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	2
16	Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	4
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4
20	Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	4
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	4
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2

24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2
26	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	2
29	Dinas Pariwisata	2
30	Dinas Kebudayaan	2
31	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan	2
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2
33	Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang dan Pertanahan	2
34	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	2
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2
36	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	1
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2
38	Badan Penanggulangan Bencana	2
39	Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau	1
<b>TOTAL</b>		<b>112</b>

### 3.5 Operasionalisasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu :

#### 1. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat (*dependent variabel*) adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Pengamatan akan dapat mendeteksi ataupun menerangkan variabel dalam variabel terikat beserta

perubahannya yang terjadi kemudian. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.

## 2. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat (*dependent variable*) dan mempunyai pengaruh positif ataupun negatif bagi variabel terikat nantinya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah: Partisipasi Penyusunan Anggaran (X1), Kejelasan Sasaran Anggaran (X2), Akuntabilitas Publik (X3), dan Sistem Pelaporan (X4).

**Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Butir Pertanyaan	Skala Pengukuran
Partisipasi Penyusunan Anggaran (X1)	Menurut Bangun (2009) partisipasi penyusunan anggaran dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang dalam menyusun dan memutuskan anggaran secara bersama.	a. Melibatkan bawahan. b. Memberi kesempatan pada bawahan. c. Informasi kepada bawahan. d. Kontribusi bawahan dalam anggaran SKPD. (Bangun,2009)	(1) (2) (3) (4, 6)	Skala likert
Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)	Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran	a. Tujuan b. Kinerja c. Standar	(7) (8) (9)	Skala likert

	ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang ber-tanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut. (Bangun, 2009)	d. Jangka Waku e. Sasaran Prioritas f. Tingkat Kesulitan g. Koordinasi (Putra, 2013)	(10) (11) (12) (13)	
Akuntabilitas Publik (X3)	Mardiasmo (2002) dalam (Herawaty, 2011), Akuntabilitas Publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawabana, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawabana tersebut.	a. Akuntabilitas kejujuran b. Akuntabilitas hukum c. Akuntabilitas program d. Akuntabilitas Proses e. Akuntabilitas Kebijakan (Herawaty, 2011)	(14) (15) (16,17,18) (19) (20,21)	Skala likert
Sistem Pelaporan (X4)	Anthony (2000) dalam (Hidayattullah, 2015) Sistem pelaporan adalah laporan yang menggambarkan mengenai penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang	a. Penyebab terjadinya penyimpangan b. Tindakan yang diambil c. Lamanya waktu koreksi (Hidayattullah, 2015)	(23,24,25) (26) (27,28)	Skala likert

	diambil untuk mengoreksi variansi yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi lebih efektif.			
Kinerja Manajerial (Y)	Meurut Supriyatno (2010) dalam (Efrizar, 2017), Kinerja manajerial adalah kinerja dari individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial yang meliputi perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, negosiasi, dan perwakilan atau presentasi. Salah satu hal yang berkaitan erat dengan kinerja manajerial adalah partisipasi manajer dalam proses penyusunan anggaran.	a. Perencanaan b. Investigasi c. Pengkoordinasian d. Evaluasi e. Pengawasan f. Pemilihan Staff g. Negoisasi h. Perwakilan (Putra, 2013)	(29) (30) (31)  (32) (33) (34) (35)	Skala likert.

### 3.6 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, digunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Pada metode kuantitatif, semua data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif berdasarkan pendapat para ahli sebagai landasan teori. Kuesioner yang telah diisi oleh responden dikuantitatifkan terlebih dahulu sehingga menghasilkan keluaran berupa angka-angka yang selanjutnya dianalisis menggunakan uji statistik dengan Program SPSS (*Statistical For Social Science*).

#### 3.6.1 Uji Validitas

Uji *Validitas* adalah pengujian tingkat ketepatan menggunakan alat pengukur terhadap suatu gejala atau kejadian dimana alat ukur yang diuji adalah butir-butir pertanyaan kuesioner. Uji *Validitas* digunakan untuk mengukur sah/valid atau tidaknya suatu kuesioner. Sunyoto (2011:72). Dalam menentukan layak tidaknya suatu item yang akan digunakan uji signifikan koefisien korelasi pada tiao signifikan 0,005 artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikan 0,005 kriteria pengujian sebagai berikut :

- a. Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (uji 2 sisi dengan sig. 0,005) maka instrument atau item-item pertanyaan berkorelasi terhadap skor total dinyatakan valid.
- b. Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  (uji 2 sisi dengan sig. 0,005) maka instrument atau item-item pertanyaan berkorelasi terhadap skor total dinyatakan tidak valid.

### 3.6.2 Uji Reliabilitas

*Reliabilitas* adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan dikatakan *reliable* atau andal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten. Pengukuran keandalan butir pertanyaan dengan sekali menyebarkan kuesioner pada responden, kemudian hasil skornya diukur korelasinya antar skor jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan bantuan SPSS 21.0 dengan fasilitas *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu konstruk atau variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,60$ . (Sunyoto, 2011:67).

### 3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk melihat apakah di dalam model regresi tersebut terdapat suatu penyimpangan, sehingga perlu diadakan pemeriksaan dengan menggunakan pengujian *uji multikolinearitas*, *uji heteroskedastisitas*, *uji normalitas* dan *uji autokorelasi*.

#### a. Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas merupakan suatu situasi dimana beberapa atau semua variabel bebas berkorelasi kuat. Jika terdapat korelasi yang kuat di antara sesama variabel independen maka konsekuensinya adalah:

- a. Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir
- b. Nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tidak terhingga

Dengan demikian berarti semakin besar korelasi diantara sesama variable Independen, maka tingkat kesalahan dari koefisien regresi semakin besar yang mengakibatkan standar errornya semakin besar pula. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas adalah dengan menggunakan *Variance Inflation Factors (VIF)*.

Jika nilai *tolerance* ( $\alpha$ ) lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak memiliki masalah multikolinearitas diantara kedua variabel bebasnya, sehingga model memenuhi salah satu asumsi untuk dilakukan pengujian regresi linier berganda (Sunyoto, 2011:88)

#### **b. Uji Heteroskedastisitas**

Uji *heteroskedastisitas* bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, atau disebut *homoskedastisitas*. Model regresi yang baik adalah yang *homoskedastisitas*, tidak *heteroskedastisitas*.

*Homoskedastisitas* terjadi jika pada scatterplot titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar dibawah maupun di atas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. Sedangkan *Heterokedastisitas* terjadi jika pada scatterplot titik-titiknya mempunyai pola yang teratur, baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang. (Sunyoto, 2011:83).

**c. Uji Normalitas**

Uji asumsi ini akan menguji data variabel bebas (X) dan data variable terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. (Sunyoto, 2011:84).

Untuk menguji model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik yang bersangkutan. Syarat uji normalitas, yaitu:

- i. Bila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normal.
- ii. Bila data menyebar jauh dari garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
- iii. Untuk memeriksa model regresi berdistribusi normal atau tidak dapat diperiksa melalui gambar *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*.

**d. Uji Autokorelasi**

Menurut Sunyoto (2011:91-92), persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Masalah autokorelasi baru timbul jika ada korelasi secara linier antara keseluruhan pengganggu periode t (berada) dan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya).

Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW), dengan ketentuan sebagai berikut :

- i. Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW dibawah -2 ( $DW < -2$ ).
- ii. Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW berada di antara -2 dan +2 atau  $-2 \leq DW \leq +2$ .
- iii. Terjadi autokorelasi negative jika nilai DW di atas +2 atau  $DW > +2$ .

#### 3.6.4 Uji Regresi Linear Berganda

Menurut (Priyatno, 2012) analisis linier berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap suatu variabel independen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen. Dalam regresi linear berganda terdapat asumsi klasik yang harus terpenuhi, yaitu residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinieritas, tidak adanya heteroskedastisitas, dan tidak adanya autokorelasi pada model regresi.

1. *Standardized Coefficients* adalah nilai koefisien yang sudah terstandarisasi. Nilai koefisien Beta semakin mendekati 0 maka hubungan antara variabel X dengan Y semakin lemah.
2. T hitung adalah pengujian signifikan untuk mengetahui pengaruh variabel X1, X2, X3, X4, terhadap Y secara parsial, apakah pengaruh signifikan atau tidak. Untuk mengetahui hasil signifikan atau tidak, angka t hitung akan dibandingkan dengan t tabel.

3. Signifikan adalah besarnya probabilitas atau peluang untuk memperoleh kesalahan dalam mengambil keputusan. Jika penguji menggunakan tingkat signifikan 0,05 artinya peluang memperoleh kesalahan maksimal 5% dengan kata lain, kita percaya bahwa 95% keputusan adalah benar.

Persamaan regresi untuk menguji hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

**Keterangan:**

Y	=	Kinerja Manajerial
X1	=	Partisipasi Penyusunan Anggaran
X2	=	Kejelasan Sasaran Anggaran
X3	=	Akuntabilitas Publik
X4	=	Sistem Pelaporan
e	=	Error Term

### 3.6.5 Uji Hipotesis

#### a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- $H_0 : p = 0$  Partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan sistem pelaporan tidak berpengaruh simultan terhadap kinerja manajerial.
- $H_a : p \neq 0$  Partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan sistem pelaporan berpengaruh simultan terhadap kinerja manajerial.
  - a. Jika probabilitas  $>$  tingkat signifikan maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima
  - b. Jika probabilitas  $<$  tingkat signifikan maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak

**b. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)**

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan Uji T adalah:

$H_0 : p = 0$  Partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, Akuntabilitas Publik dan sistem pelaporan tidak berpengaruh parsial terhadap kinerja manajerial.

$H_a : p \neq 0$  Partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, Akuntabilitas Publik dan sisem pelaporan berpengaruh pasial terhadap kinerja manajerial.

- a. Jika  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak
- b. Jika  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel maka  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima

**c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Menurut Ghozali (2012:97) menyatakan bahwa uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variabel dependen.  $R^2$  sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikit pun variabel independen. Sebaliknya  $R^2$  sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen sempurna atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen (Priyatno, 2010:66).

Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  $Kd = (r^2 \times 100\%)$

Keterangan :

$Kd$  = Koefisien Determinasi

$r^2$  = Koefisien Korelasi

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriyadi, Teguh. 2008. Konsep tentang akuntabilitas dan implementasinya di Indonesia. September 10, 2009. <http://www.depkominfo.go.id/portal>.
- Amertadew, dan Dwiranda, A.A.N.B., 2013. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Gaya Kepemimpinan dan Locus of Control Sebagai Variabel Moderasi." *E-Jurnal Akuntansi* (hlm.4).
- Anjarwati, M. 2012. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal* 3(1), (hlm. 1–7).
- Apriyanti, H. W. 2017. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Permoderasi. *Jurnal Akuntansi Indonesia* (hlm.156).
- Bagus, I. A. D. 2010. *Penganggaran Perusahaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bangun, A. 2009. *Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang)*". Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Dwiyanto, A. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ebrahim, A. 2010. *The Many Faces Of Non Profit Accountability*. Harvard Business School.
- Edison. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Efrizar, R. 2017. "Pengaruh Kejelasan Anggaran, Akuntabilitas Publik, dan Sistem Pelaporan terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu)". *JOM Fekon, Vol. 4 No. 1*.
- Emilia, R.N., A. W. 2013. "Pengaruh Partisipasi dalam Penganggaran , Kejelasan Sasaran Anggaran Serta Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Bengkulu)". *Jurnal Fairness* 3 (hlm. 42–53).
- Garrison, et al. 2013. *Akuntansi Manajerial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, I. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Yogyakarta: Univeristas Diponegoro.

- Ginting, H. S. 2009. "Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Karo". Universitas Sumatera Utara.
- Hall, J. A. (Ed). 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Herawaty, N. 2011. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, (hlm. 59–72).
- Hidayattullah, A., dan I. Herdjiono. 2015. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD Di Merauke. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers UNISBANK*.
- Ikhsan, A. (2009). *Akuntansi Manajemen Perusahaan Jasa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Indarto, S.L., A. 2011. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Perusahaan Melalui Kecukupan, Komitmen Organisasi, Komitmen Tujuan Anggaran, Dan Job Relevant Information (JRI). *Seri Kajian Ilmiah*, Unika Soegijapranata Semarang.
- Indriantoro, N. (2011). *Metodologi Penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen*. Yogyakarta: BPFPE.
- Julyalahi, E. (2017). "Pengaruh Partisipasi Anggaran, Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja, Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Manajerial Pada SKPD Kabupaten Bintan". *Jurnal Akuntansi*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kelima. Yogyakarta: Andi.
- Mardika, K.B. 2015. "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Uleleng". *Jurnal Manajemen*. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia.
- Masiyah, K. 2008. Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Akuntabilitas dan Transparan Keuangan Partai Politik.
- Moehersono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kinerja*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mowen, H. 2013. *Akuntansi Manajerial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

- Mutiarasari, Y. A. 2018. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Klaten). *Tesis*. Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Muzahid. 2017. Pengaruh Penganggaran Partisipatif, Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Akuntansi* (hlm.110–124).
- Nafarin, M. 2012. *Penganggaran Rencana Kerja Perusahaan*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Nafarin, M. 2013. *Penganggaran Perusahaan* Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Penny Kusumatuti, L. 2014. *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Kedepan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Priyatno, D. 2010. *Teknik mudah dan cepat melakukan analisis data penelitian dengan SPSS dan tanya jawab ujian Pendaratan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Gava Media.
- Putra, D. 2013. "Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah". *Jurnal Akuntansi*. Universitas Negeri Padang.
- Sasongko, P. 2015. *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U. 2008. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Sembiring, S. A. 2008. "Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening Pada Kawasan Industri Medan". *Tesis*. Universitas Sumatera Utara.
- Setiawan, E. 2013. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan". *Jurnal* (hlm. 1–14). Universitas Riau.
- Suharsimi, A. 2010. *Anggaran Perusahaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sujarweni, V. W. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Sunyoto, D. 2011a. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Yogyakarta: CAPS.

- Sunyoto, D. 2011b. *Metodologi penelitian Ekonomi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: CAPS.
- Susanto, A. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Gramedia.
- Sutanta, E. 2009. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syafrial. 2009. "Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun". *Tesis*. Univeristas Sumatera Utara.
- Syahputra, Z. (2014). Budget Participation on Managerial Performance : Related Factors in that influenced to Government's Employee (Study of Indonesian Local Government). *Journal of Economics and Sustainable Development* (hlm. 52). Universitas Syiah Kuala Aceh.
- Torang, S. 2012. *Metode Riset Struktur Dan Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Yulianti, R. 2014. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah". *Jurnal Akuntansi Ekonomi*. Universitas Riau.
- Zulkarnain, A. 2013. "Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Analisis Standar Belanja Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Sukabumi)". *Tesis*. Universitas Terbuka.

## CURICULUM VITAE



Nama : SYAKILA

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 17 Oktober 1995

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Email : sykla17@gmail.com

Alamat : Jl. Ganet Perum Bintan Permai Blok C3 No.12

Pendidikan : - SD Negeri 011 Tanjungpinang  
- SMP Negeri 1 Tanjungpinang  
- SMA Negeri 1 Tanjungpinang  
- STIE Pembangunan Tanjungpinang